

Banyak Kasus Korupsi "Macet" di KPK, Ketua: Kendalanya Tidak di Pimpinan

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara, Nawawi Pomolango, menyebut, banyak kasus korupsi macet di lembaga yang kini dipimpinnya bukan karena masalah di tingkat pimpinan.

Seperti diketahui, sejumlah kasus yang ditangani lembaga antirasuah itu sampai saat ini belum diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

Padahal, dalam ekspose atau gelar perkara, penyidik sampai pejabat struktural Kedepuan Penindakan dan Eksekusi serta pimpinan KPK, telah bersepakat menaikkan kasus itu ke tingkat penyidikan dan menetapkan tersangka.

"Saya pastikan, kendalanya tidak di tingkat pimpinan, terima kasih," kata Nawawi kepada wartawan Selasa (27/2).

Sejumlah kasus yang telah diekspose antara lain, dugaan korupsi pengadaan ratusan toilet mewah Bekasi, Jawa Barat, dugaan ko-

rupsi di PT Tabung dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), Perusahaan Listrik Negara (PLN). Kemudian, kasus dugaan pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) cabang KPK, dan dugaan korupsi dalam pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR RI.

Meski perkara itu sudah disepakati naik penyidikan dalam ekspose, namun hingga saat ini belum diterbitkan Sprindik.

Nawawi mengatakan, proses penerbitan Sprindik di KPK berjenjang dari Direktorat Penyidikan ke Deputi Penindakan dan Eksekusi.

"Nanti kami tanya pada Direktur Sidik dan deputi Penindakan," ujar Nawawi.

"Tapi memang banyak praktek yang semacam ini, kebanyakan alasannya, masih *nangani* perkara yang lain," katanya. ● **han**

Pemerintah Usul Dana "Replanting" Kelapa Sawit Naik Dua Kali Lipat

JAKARTA (IM) - Pemerintah mengusulkan kenaikan dana hibah untuk peremajaan (replanting) kelapa sawit untuk petani swadaya menjadi Rp60 juta per hektare. Sementara, dana hibah hanya mencapai Rp30 juta per hektare.

Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/2).

"Kami usulkan kenaikan dana untuk replanting (sawit) yang sekarang diberikan Rp30 juta itu untuk dinaikkan ke Rp60 juta," kata Airlangga.

Mantan menteri perindustrian ini beralasan, dana Rp30 juta per hektare hanya mampu mengakomodasi biaya peremajaan sawit di tahun-tahun awal. Sedangkan tanaman sawit baru akan berbuah pada tahun keempat, setelah dilakukan replanting. Hal ini juga disuarakan oleh para pekebun sawit dan hasil

kajian akademik.

"Kenapa harus dinaikkan Rp60 juta, karena dari hasil kajian naskah akademik dan juga komunikasi dengan para pekebun, itu untuk replanting mereka baru bisa berbuah di tahun ke-4," ucap Airlangga.

"Sehingga kalau dananya hanya Rp30 juta, itu hanya cukup untuk mereka hidup di tahun pertama. Beli bibit lalu hidup di tahun pertama," katanya.

Sementara dana diperlukan pekebun untuk membeli bibit maupun membersihkan lahan agar hasil produksi sawit dapat optimal.

"Oleh karena itu, kalau ditingkatkan menjadi Rp 60 juta, maka biaya hidup sekitar Rp 15 juta per tahun itu bisa dicover. Sehingga mereka bisa melakukan tanam sela atau tanam lain untuk menunjang hidup juga," beber Airlangga. ● **mei**

KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur 9-10 Maret 2024

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia. Rencananya, PSU itu akan digelar pada Sabtu (9/3) dan Minggu (10/3) mendatang.

"Rencananya untuk PSU kotak suara keliling (KSK) di Kuala Lumpur pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024. Kemudian, metode TPS (Tempat Pemungutan Suara) -nya Ahad 10 Maret 2024," kata Hasyim dalam jumpa pers, Selasa (27/2).

Perbedaan tanggal ini bertujuan agar suara yang dihimpun melalui metode KSK bisa memiliki waktu satu hari untuk dihitung bersamaan dengan suara dari TPS.

"Sehingga diharapkan sampai dengan 12 Maret sudah ada rekapitulasi penghitungan suara PPLN Kuala Lumpur, sehingga nanti bisa melengkapi rekapitulasi suara untuk pemilu di luar negeri," ujar Hasyim.

KPU berharap, pelaksanaan PSU di Kuala Lumpur tidak mengganggu jadwal dan tahapan rekapitulasi berjenjang secara manual. Sesuai UU Pemilu, KPU harus sudah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara maksimum 35 hari sejak pencoblosan, dalam hal ini pada 20 Maret 2024.

KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebelumnya sepakat tidak

menghitung suara pemilihan pos dan KSK di Kuala Lumpur karena integritas daftar pemilih dan akan mengulang proses pemilu.

Dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPLN) Kuala Lumpur pada 2023 lalu, Bawaslu menemukan hanya sekitar 12 persen pemilih yang dicoklit dari total sekitar 490.000 orang dalam Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Kementerian Luar Negeri (Kemenu).

Bawaslu juga menemukan panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarli) fiktif hingga 18 orang. Akibatnya, pada hari pemungutan suara, jumlah daftar pemilih khusus (DPK) membudak hingga sekitar 50 persen di Kuala Lumpur.

Pemilih DPK adalah mereka yang tidak masuk daftar pemilih. Bawaslu bahkan menyampaikan, ada dugaan satu orang menguasai ribuan surat suara yang seयोगiannya dikirim untuk pemilih via pos.

Kemudian, Bawaslu juga mengaku sedang menelusuri dugaan perdagangan surat suara di Malaysia. Dari sisi KPU, seluruh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur dinonaktifkan sementara berdasarkan hasil pengawas internal. ● **han**

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



KSAD RESMIKAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DESA DI BANYUMAS

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (tengah) memeriksa debit air sumur bor dari program peningkatan kesejahteraan desa di Desa Tipar, Rawalo, Banyumas, Jateng, Selasa (27/2). Program peningkatan kesejahteraan desa oleh TNI AD meliputi pembangunan 32 titik sumur bor di Kab. Banyumas, Jateng, dari total 1900 titik sumur bor yang sudah dibangun di seluruh Indonesia, dan pembangunan 100 Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Banyumas.

Suara Partai 'Gurem' Ditengarai Dialihkan ke Parpol Lain, Pengamat: Tak Bisa Ditolerir

Parpol dan masyarakat yang punya bukti bahwa perolehan suaranya dialihkan ke parpol lain melakukan perlawanan atas kecurangan tersebut.

JAKARTA (IM) - Berbagai isu miring yang beredar tentang penyelenggaraan Pemilu 2024, seperti dugaan upaya pengalihan perolehan suara partai-partai 'gurem' ke partai politik (parpol) tertentu agar bisa lolos parlementary threshold atau ambang batas 4%.

Partai 'gurem' yang dimaksud adalah parpol yang perolehan suaranya sangat kecil, sehingga tidak bisa melenggang ke Senayan. Parpol yang diduga dialihkan perolehan suaranya, di antaranya Perindo, Partai Ummat, Partai

Gelora, dan beberapa partai lainnya.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, sangat berbahaya jika itu benar terjadi. Hal tersebut merupakan kejahatan demokrasi yang nyata tidak bisa ditolerir.

Ujang menyarankan agar rakyat maupun parpol yang merasa perolehan suaranya dialihkan ke parpol lain melakukan perlawanan atas kecurangan tersebut.

"Ini bahaya ya kalau itu benar terjadi, kalau itu sam-

pai terjadi ada pengalihan suara partai Perindo, Ummat, Gelora ke partai tertentu untuk lolos ke Senayan ini kejahatan demokrasi yang nyata, kejahatan demokrasi yang besar ini tidak bisa ditolerir. Dalam konteks ini parpol harus melawan, rakyat pun harus melawan terkait persoalan kecurangan yang dalam hal ini," ujar Ujang kepada wartawan, Selasa (27/2).

"Saya melihat kalau betul ini terjadi, dan dilakukan oleh siapapun untuk meloloskan partai tertentu ke Senayan agar bisa lolos 4 persen dengan demikian, mengambil alih suara partai yang tidak lolos ke Senayan seperti Perindo, Ummat, Gelora maka ini bisa dikatakan sebuah kejahatan yang terencana sedang

dilakukan pihak tertentu itu," ujarnya.

Ujang menyebut dalam konteks ini rakyat jangan tinggal diam, parpol juga jangan tinggal diam harus melekat terbuka hati, matanya ini tidak boleh terjadi.

"Ini adalah penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan dilakukan oleh kelompok atau oknum tertentu akan merusak demokrasi dan akan dicatat dalam sejarah bahwa mereka mendapat suara dengan cara yang haram artinya menghalalkan segala cara untuk bisa lolos ke Senayan dan ini tak patut ditiru harus dilawan oleh segenap rakyat Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden (TKRPP) sekaligus Politikus PDI Perjuangan, Dedy

Yevri Sitorus merasa janggal dengan proses penghitungan suara Pemilu 2024. Apalagi, KPU sebelumnya telah memberi perintah ke aparat penyelenggara pemilu ke daerah untuk menghentikan proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Dedy menduga, penghentian itu didasari atas adanya partai kecil di lingkungan penguasa yang hendak masuk parlemen.

"Ada kuat kecurangan upaya tersistematis untuk memenangkan salah satu kontestan Pemilu. Ada kabar saya dengar kabar bahwa ada operasi agar suara partai kecil akan diambil untuk dialihkan, terutama Partai Perindo, Gelora dan Partai Ummat," kata Dedy dalam keterangannya yang dikutip Kamis (22/2) lalu. ● **han**

Tolak Hak Angket Kecurangan Pilpres, Golkar Pertanyakan Urgensinya Apa?

JAKARTA (IM) - Partai Golkar menolak wacana hak angket yang bakal digulirkan oleh partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3, di DPR.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily justru mempertanyakan urgensi untuk mengulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan Ace saat ditanya tentang pandangan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD bahwa hak angket bisa berujung pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Makanya, harus kita lihat secara jelas, kalau, pertama, tentu partai Golkar menolak terhadap hak angket tersebut, jelas saya kira," kata Ace saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/2).

"Yang kedua, urgensi dari hak angket ini apa? Kalau yang dipersoalkan adalah tentang kecurangan pemilu, maka tidak pada tempatnya hak angket mempertanyakan soal kecurangan pemilu," katanya.

Pembuat Undang-Undang (UU) Pemilu adalah DPR sendiri. Dalam UU itu, disebutkan bahwa segala mekanisme tentang Pemilu sudah diatur.

"Kalau DPR sendiri tidak percaya terhadap UU yang dibuatnya, lalu buat apa? Ya kan?" kata Ace dengan nada bertanya.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat ini mengatakan, untuk menelusuri dugaan kecurangan pilpres maupun pemilu pun bisa melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Apalagi, semua lembaga penyelenggara Pemilu dipilih oleh DPR. Maka dari itu,

Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menyarankan pihak-pihak yang merasa ada kecurangan pilpres menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) atau Bawaslu.

"Kalau hasil dari pemilu ini dinilai tidak memiliki, diduga melakukan kecurangan, kan tinggal diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi," katanya.

"Jadi sesungguhnya menurut saya, hak angket ini menurut saya tidak relevan dalam konteks kecurangan pemilu," ucap Ace.

Wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengutus dugaan kecurangan Pemilu 2024 semakin kuat berembus.

Wacana itu pertama kali diusulkan oleh kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. ● **mei**

Umat Hindu Dukung Rencana KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama

JAKARTA (IM) - Umat Hindu menyambut baik rencana Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Quouma, yang akan menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai tempat pernikahan semua agama.

"Umat Hindu seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Gus Men (sebutan untuk Menag Yaqut - red). Umat mengapresiasi rencana ini, karena bisa dapat memberikan kemudahan," kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu), I Nengah Duija, sebagaimana dikutip dalam laman resmi kemenag, Selasa (27/2).

Kemudahan yang dapat dirasakan oleh umat Hindu, menurut I Nengah Duija mengatakan, kemudahan yang dapat dirasakan oleh umat Hindu di Indonesia, khususnya terkait dengan pencatatan nikah.

"Kami (nantinya) menjadi sangat mudah dalam proses pencatatan perkawinan. Setelah upacara keagamaan, catatan pernikahan dilakukan di KUA yang nanti terkoneksi dengan Dukcapil sehingga amat memudahkan," ucap I Nengah Duija.

Saat ini, Dirjen Bimas Hindu bersama Dirjen Dirjen Bimbingan Masyarakat lainnya, sedang meng-

kaji berbagai peraturan terkait.

"Mudah-mudahan program ini cepat bisa direalisasikan dan dinikmati umat Hindu di Indonesia," katanya.

Dsukungan juga disampaikan Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau akrab dipanggil Bamsot. Dalam keterangan tertulisnya, Bamsot meminta Kemenag untuk mengoptimalkan rencana pengembangan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan semua agama, utamanya dalam hal integrasi data-data pernikahan dan perceraihan agar bisa dilakukan dengan lebih baik.

Ia juga mengapresiasi Kemenag yang mengupayakan kemudahan akses bagi seluruh umat beragama di Indonesia melalui keberadaan KUA.

"Semoga KUA dapat sepenuhnya sebagai pusat layanan keagamaan lintas agama," kata Bambang.

Ia meminta Kemenag untuk berkoordinasi dengan seluruh pemuka agama di Indonesia terkait rencana tersebut.

"Agar ke depannya bisa dilakukan penyelesaian fungsi KUA tanpa harus mengganggu ketentuan yang berlaku di masing-masing agama," katanya. ● **mei**



PENGEMBALIAN UANG KORUPSI DANA BOS DI KEJARI BATAM

Kajari Batam I Ketut Kasna Dedi (kedua kanan) didampingi Kasi Pidus Tohom Hasilolan (kedua kiri), Kasi Intel Andreas Tarigan (kanan), dan Kasi Penyidik Pidsus Dedi Januarto Simatupang (kiri) memperlihatkan uang pengembalian kasus korupsi pengelolaan anggaran SMK Negeri 1 Batam di Kejaksaan Negeri Batam, Kepri, Selasa (27/2). Kejari Batam menerima pengembalian uang negara Rp 468.974.117 dari terpidana kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) periode 2017-2019, Lea Lindrawijaya Suroso yang merupakan mantan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Batam.

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi persyaratan dalam pasal 125 ayat 7 dan Pasal 127 ayat 2 dan 8 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT GREAT INDOCHEM berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan rencana pengalihan sebagian besar saham Perseroan milik Ny. Dian Anisah Salim. Barangsiapa yang ingin mengajukan keberatan dengan maksud pengambilalihan saham-saham tersebut agar selambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini dapat ditujukan kepada: PT GREAT INDOCHEM Jl. Gajah Mada No. 3-5, Komp. Duta Merlin Blok B No. 4, Jakarta Pusat Jakarta, 28 Februari 2024 Atas Nama Direksi PT GREAT INDOCHEM

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi persyaratan dalam pasal 125 ayat 7 dan Pasal 127 ayat 2 dan 8 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT JAYA TANDJUNG berkedudukan di Jakarta ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan rencana pengalihan sebagian besar saham Perseroan milik Ny. Dian Anisah Salim. Barangsiapa yang ingin mengajukan keberatan dengan maksud pengambilalihan saham-saham tersebut agar selambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini dapat ditujukan kepada: PT JAYA TANDJUNG Jl. Raya Tipar Cakung No. 53, Cakung Barat Jakarta Timur Jakarta, 28 Februari 2024 Atas Nama Direksi PT JAYA TANDJUNG